

RENSTRA
KECAMATAN BALIGE
TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025



BUPATI TOBA PROVINSI
SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025- 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun..
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 5

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, regulasi, atau kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah;
 - b. Penyesuaian indikasi pendanaan;
 - c. Perubahan perangkat daerah penanggung jawab urusan pemerintahan; dan/atau
 - d. Perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, tanpa mengubah substansi dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keselarasan, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025 SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN TOBA,

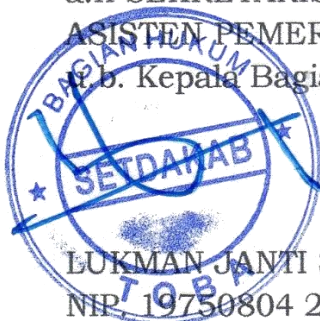
Cap/ dto

AUGUS SITORUS

**BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR
31**

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
d.b. Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. 19750804 200502 1 002

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberkati dan memberikan karunia sehingga Pemerintah Kecamatan Balige dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balige untuk masa 5 (lima) tahun kedepan sebagai implementasi dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Harapan kami, Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Balige ini dapat membantu dan menjadi pedoman aparatur Pemerintah Kecamatan Balige dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dicita-citakan yakni terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan Balige Kabupaten Toba.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu, dokumen ini juga memuat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Kecamatan Balige Kabupaten Toba untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Kecamatan Balige Kabupaten Toba yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsistensi terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Kecamatan Balige dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Disamping itu, kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, maka untuk kesempurnaannya pada Renstra selanjutnya, akan tercapai melalui saran, kritik yang konstruktif dari para pembaca.

Akhirnya, besar harapan kami bahwa Renstra Kecamatan Balige ini benar-benar dapat menjadi prasarana kami dalam memberikan pelayanan pembangunan di Kecamatan Balige menuju masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Balige, Juni 2025.

CAMAT BALIGE



PARTOGI IHUTAN TAMBUNAN, SSTP, M.A

NIP. 198709112006021003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan renja Kerja pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan Rencana-rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Toba, Kecamatan Balige sebagai unit kerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan dokumen perencanaan yang konsisten dan akuntabel untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Perangkat Daerah yang handal dengan didukung oleh sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis Kecamatan Balige Tahun 2025 - 2029 Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Kecamatan Balige dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2025-2029) dan menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Toba.

Dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi dan program Kepala Daerah yang penyusunanya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan

disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Kecamatan Balige Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Balige Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Balige Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
2. Rencana Strategis Kecamatan Balige Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balige yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan Balige Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Balige, baik evaluasi Rencana Strategis maupun evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Balige. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balige.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Balige tahun 2025-2029 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Balige Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Balige untuk kurun waktu Tahun 2025–2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Balige.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balige tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Balige yang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah mulai dari tingkat desa/kelurahan dan

Kecamatan serta isu- isu yang berkembang dalam pembangunan Kecamatan Balige.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Balige Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balige dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Toba;

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Balige untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Toba khususnya Kecamatan Balige.
- 4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Balige dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balige yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.
- 5) Merupakan suatu acuan resmi bagi Kecamatan Balige dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Toba dan masyarakat, serta suatu bahan untuk memudahkan Aparat Perangkat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahunan dalam rentang waktu 5 tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balige Tahun 2025- 2029 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.2. LANDASAN HUKUM

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BALIGE
2.1	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALIGE
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Balige
2.1.2	Sumber Daya Kecamatan Balige
2.1.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Balige
2.1.4	Kelompok Sasaran Pelayanan
2.2	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BALIGE
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balige
2.2.2	Isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	TUJUAN RENSTRA KECAMATAN BALIGE
3.2	SASARAN RENSTRA KECAMATAN BALIGE
3.3	STRATEGI RENSTRA KECAMATAN BALIGE
3.4	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN BALIGE
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	URAIAN PROGRAM
4.2	URAIAN KEGIATAN
4.3	URAIAN SUBKEGIATAN BERSERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF
4.4	URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.5	TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN BALIGE TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

4.6 TARGET KINERJA PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR
KINERJA KUNCI (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

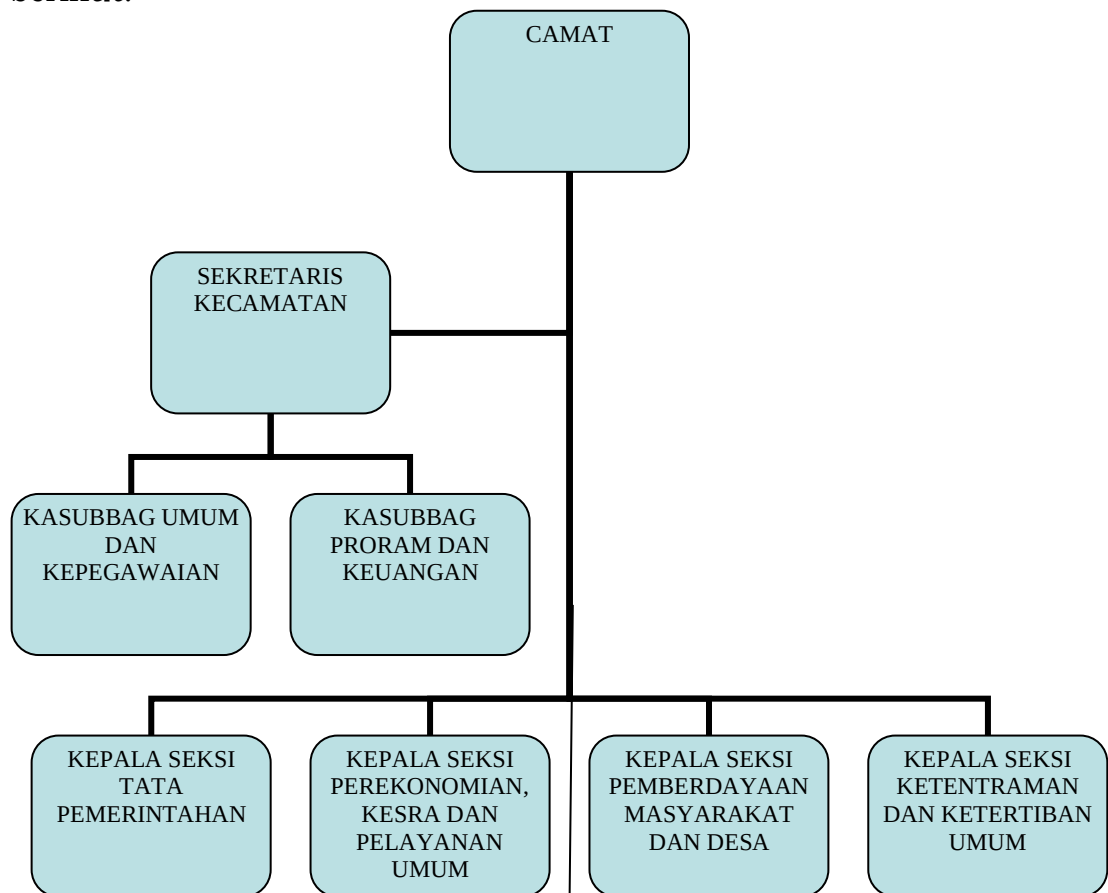
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BALIGE

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan BALIGE

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Balige

Pemerintah Kecamatan terdiri dari unsur pimpinan yaitu Camat, unsur Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan serta Sub Bagian Program dan Keuangan, ditambah 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin oleh kepala Seksi yaitu: Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan 6 (enam) Kelurahan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagai berikut:



Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, dan seksi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. CAMAT
 - 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
 - 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Camat sebagai berikut :

- a) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Seksi dan UPT pada Kecamatan serta kelompok Jabatan fungsional;
- c) Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
- d) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- g) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
- i) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- j) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- k) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- n) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Kondisi dan Potensi Geografis

Mengingat Balige adalah merupakan Ibukota Kabupaten sekaligus menjadi ibukota Kecamatan, maka Kantor Camat Balige dituntut untuk selalu dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kantor Camat Balige terletak di Jln Mulia Raja No. 26 Balige terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) dan 6 (enam) kelurahan terletak pada 2 °15 '2 °21 Lintang Utara dan 99 °-99 °11 Bujur Timur dengan Luas Wilayah : 91,05 KM². Adapun batas wilayah Kecamatan Balige adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Danau Toba

Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Utara

Sebelah Timur : Kecamatan Laguboti

Sebelah Barat : Kecamatan Tampahan

b. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia (Pegawai) Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (Pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan Balige tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Pegawai Kecamatan Balige berjumlah 50 orang,

terdiri dari 46 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1.1

SDM Kantor Kecamatan BALIGE Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1.	Pembina Tk. I (IV/b)					0
2.	Pembina (IV/a)			4	1	5
3.	Penata Tk. I (III/d)			12		12
3.	Penata (III/c)			12		12
4.	Penata Muda Tk. I (III/b)			6		6
5.	Penata Muda (III/a)					0
6.	Pengatur (II/c)	11	4			15
JUMLAH		11	1	34	1	50

Tabel 1.2

SDM Kantor Kecamatan Balige Berdasarkan Jabatan dan Jumlah Pegawai Tahun 2025

No.	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	28
3.	Staf	16
4.	Non PNS	4
JUMLAH		50

Tabel 1.3

SDM Kantor Kecamatan Balige Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	29
2.	Perempuan	21
JUMLAH		50

Tabel 1.4
SDM Kantor Kecamatan Balige yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan
Diklat Pim III dan IV

No.	Diklat Pim	Jumlah
1.	Pim III	0
2.	Pim IV	0
	JUMLAH	0

Kecamatan Balige mempunyai 60 orang Pegawai pada awal Januari 2025. Dengan Rincian sebanyak 30 orang Pejabat Struktural, dan 16 orang staf/pelaksana serta 12 orang tenaga harian kontrak, dan 6 orang Sekdes ASN yang berpendidikan SLTA yang berada dibawah koordinasi Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

c. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan Sarana dan Prasarana Kecamatan Balige telah dilengkapi dan diharapkan mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Aset/modal yang dimiliki Kecamatan Balige dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan total nilai aset Rp10.567.731.591,-

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam.

Tabel 2.5
 Sarana dan Prasarana Kecamatan Balige
 JUMLAH SARANA DAN PRASARANA BERDASARKAN KONDISI DI KECAMATAN
 BALIGE TAHUN 2025

No.	Jenis barang/ Nama Barang	Tahun Pembelian	Kondisi
1	3	8	17
1	Filing Cabinet Besi	2003	Rusak
2	Truck + Attachment	2005	Baik
3	Sepeda Motor	2007	Baik
4	Lap Top	2008	Rusak
5	Film Projector	2009	Rusak
6	Lemari Kayu	2010	Baik
7	Lemari Kayu	2011	Baik
8	Tempat Tidur Kayu	2011	Rusak
9	Sofa	2011	Baik
10	Gordyin/Kray	2011	Baik
11	Pompa Air	2012	Baik
12	Sepeda Motor	2012	Baik
13	Sepeda Motor	2012	Baik
14	Filing Cabinet Besi	2012	Rusak
15	Filing Cabinet Besi	2012	Rusak
16	Meja 1/2 Biro	2012	Rusak
17	Meja Makan Besi	2012	Baik
18	Kursi Putar	2012	Rusak
19	Mesin Pemotong Rumput	2012	Rusak
20	Gordyin/Kray	2012	Baik
21	Lampu	2012	Rusak
22	Note Book	2012	Rusak
23	kendaraan dinas bermotor perorangan	2013	Baik

	lainnya (dst)		
24	Genset	2013	Baik
25	Note Book	2013	Rusak
26	Lemari Kayu	2014	Baik
27	Sofa	2014	Baik
28	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2014	Baik
29	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2014	Rusak
30	Lap Top	2014	Rusak
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	Rusak
32	Kursi Tamu	2015	Baik
33	Wireless	2015	Baik
34	Gordyin/Kray	2015	Baik
35	Genset	2015	Baik
36	Rak Besi	2016	Rusak
37	Mesin Absensi	2016	Rusak
38	Kasur/Spring Bed	2016	Baik
39	Meubeleur lainnya	2016	Baik
40	Rice Warmer	2016	Baik
41	Televisi	2016	Baik
42	Dispenser	2016	Baik
43	Antene SHF Portable	2016	Rusak
44	Lap Top	2016	Rusak
45	Note Book	2016	Baik
46	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	Rusak
47	Sepeda Motor	2017	Baik
48	Sepeda Motor	2017	Baik
49	Lemari Kayu	2017	Baik
50	Lemari Kayu	2017	Baik
51	Lemari Kayu	2017	Baik
52	Lemari Kayu	2017	Baik

53	Rak Kayu	2017	Baik
54	Rak Kayu	2017	Baik
55	Rak Kayu	2017	Baik
56	Rak Kayu	2017	Baik
57	Rak Kayu	2017	Baik
58	Meja Kerja Kayu	2017	Baik
59	Meja Kerja Kayu	2017	Baik
60	Meja Kerja Kayu	2017	Baik
61	Meja Kerja Kayu	2017	Baik
62	Meja Kerja Kayu	2017	Baik
63	Meja Kerja Kayu	2017	Baik
64	Meja Kerja Kayu	2017	Baik
65	Kursi Besi/Metal	2017	Baik
66	Kursi Besi/Metal	2017	Baik
67	Kursi Besi/Metal	2017	Baik
68	Meja 1/2 Biro	2017	Baik
69	Meja 1/2 Biro	2017	Baik
70	Meja 1/2 Biro	2017	Baik
71	Meja 1/2 Biro	2017	Baik
72	Meja 1/2 Biro	2017	Baik
73	Meja 1/2 Biro	2017	Baik
74	Meja 1/2 Biro	2017	Baik
75	Kasur/Spring Bed	2017	Baik
76	Sofa	2017	Baik
77	Mesin Pemotong Rumput	2017	Rusak
78	Lemari Es	2017	Baik
79	Kompas Gas (Alat Dapur)	2017	Baik
80	Lap Top	2017	Baik
81	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	Baik

82	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	Baik
83	Lemari Kayu	2018	Baik
84	White Board	2018	Baik
85	Kursi Besi/Metal	2018	Baik
86	Mesin Cuci	2018	Baik
87	Televisi	2018	Baik
88	Lap Top	2018	Baik
89	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	Rusak
90	Rice Cooker (Alat Dapur)	2019	Baik
91	Camera Video	2019	Baik
92	Dispenser	2019	Baik
93	Gordyin/Kray	2019	Baik
94	Gordyin/Kray	2019	Baik
95	Layar Film/Projector	2019	Baik
96	Speaker Komputer	2019	Baik
97	Blender	2020	Baik
98	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	Pecah
99	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	Rusak
100	Alat Kesehatan Umum lainnya	2020	Rusak
101	Infrared Thermometer	2020	Rusak
102	Sepeda Motor	2021	Baik
103	Sepeda Motor	2021	Baik
104	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2021	Baik
105	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	2021	Rusak
106	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	2021	Rusak
107	Lemari Kayu	2021	Baik
108	Filing Cabinet Besi	2021	Baik
109	Papan Nama Instansi	2021	Baik

110	Papan Nama Instansi	2021	Baik
111	Meja Kerja Kayu	2021	Baik
112	Kursi Besi/Metal	2021	Baik
113	Kursi Putar	2021	Baik
114	Mesin Pemotong Rumput	2021	Baik
115	Televisi	2021	Baik
116	Alat Hiasan	2021	Baik
117	Gordyin/Kray	2021	Baik
118	Gordyin/Kray	2021	Baik
119	Meja Rapat Pejabat lainnya	2021	Baik
120	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	2021	Baik
121	alat kedokteran anak lainnya (dst)	2021	Baik
122	Alat Kedokteran lainnya	2021	Baik
123	Alat Kedokteran lainnya	2021	Baik
124	Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain)	2021	Baik
125	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	2021	Baik
126	Lap Top	2021	Baik
127	Lap Top	2021	Baik
128	Lap Top	2021	Baik
129	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	Baik
130	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	Baik
131	Air Conditioning (AC)	2021	Baik
132	Alat Volley	2021	Baik
133	Lemari Kayu	1990	Rusak
134	Meja 1/2 Biro	2001	Rusak
135	Meja 1/2 Biro	2001	Rusak
136	Meja 1/2 Biro	2001	Rusak

137	Kursi Fiber Glas/Plastik	2003	Rusak
138	Kursi Besi/Metal	2012	Rusak
139	Kursi Fiber Glas/Plastik	2012	Rusak
140	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2013	Rusak
141	Kursi Fiber Glas/Plastik	2014	Rusak
142	Alat Dapur lainnya	2014	Rusak
143	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2014	Rusak
144	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2014	Rusak
145	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2015	Rusak
146	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2015	Rusak
147	Kursi Fiber Glas/Plastik	2015	Rusak
148	Teko Listrik	2015	Rusak
149	Rak Piring Alumunium	2015	Rusak
150	Alat Dapur lainnya	2015	Rusak
151	Alat Dapur lainnya	2015	Rusak
152	Alat Dapur lainnya	2015	Rusak
153	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2015	Rusak
154	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	2015	Rusak
155	Alat Kantor Lainnya	2016	Rusak
156	Jam Elektronik	2016	Baik
157	Rice Warmer	2016	Baik
158	Rice Warmer	2016	Rusak
159	Rice Warmer	2016	Rusak
160	Kursi Fiber Glas/Plastik	2017	Baik
161	Kursi Fiber Glas/Plastik	2017	Baik
162	Kursi Fiber Glas/Plastik	2017	Baik
163	Kursi Fiber Glas/Plastik	2017	Baik
164	Kursi Fiber Glas/Plastik	2017	Baik
165	Kursi Fiber Glas/Plastik	2017	Baik

166	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020	Baik
167	Kursi Fiber Glas/Plastik	2021	Baik
168	Pot Bunga	2021	Baik
169	Alat Dapur lainnya	2021	Baik
170	Alat Dapur lainnya	2021	Baik
171	Alat Dapur lainnya	2021	Baik
172	Alat Dapur lainnya	2021	Baik
173	Alat Dapur lainnya	2021	Baik
174	Alat Dapur lainnya	2021	Baik
175	Alat Dapur lainnya	2021	Baik
176	Alat Dapur lainnya	2021	Baik
177	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2021	Baik
178	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2021	Baik
179	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2021	Baik
180	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2021	Baik
181	Alat Kedokteran lainnya	2021	Baik
182	Peralatan Komputer lainnya	2021	Baik
183	Peralatan Komputer lainnya	2021	Baik
184	Alat Hiasan	2022	Baik
185	Tensimeter	2022	Baik
186	Note Book	2022	Baik
187	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	Rusak
188	Standar Infus	2022	Baik
189	Lemari Kayu	2023	Baik
190	Meja Rapat	2023	Baik
191	Mesin Pemotong Rumput	2023	Baik
192	Mesin Pemotong Rumput	2023	Baik
193	Mesin Pemotong Rumput	2023	Baik
194	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	2023	Baik

195	Lap Top	2023	Baik
196	Rol Meter	2023	Baik
197	Kursi Fiber Glas/Plastik	2023	Baik
198	Kursi Fiber Glas/Plastik	2023	Baik
199	Sepeda Motor	2024	Baik
200	Loudspeaker	2024	Baik
201	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2024	Baik
202	alat kedokteran anak lainnya (dst)	2024	Baik
203	Lap Top	2024	Baik
204	Kasur/Spring Bed	2025	Baik
205	Meubeleur lainnya	2025	Baik

Tabel 2.6

Sarana dan Prasarana berupa ketersediaan sekolah di Wilayah Kecamatan Balige

No	Uraian	Jumlah Lembaga	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
1	TK/Paud	55		
2	SD	32		
3	SLTP	7		
4	SMA/SMK	5		

Tabel 2.7

Sarana dan Prasarana Kesehatan berupa ketersediaan fasilitas kesehatan di Wilayah Kecamatan Balige

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Puskesmas	2	
2	Poskesdes	35	
3	Posyandu	87	
4	Pustu	0	

Kecamatan Balige telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut:

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Balige

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Balige sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Balige adalah :

- a) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pemberdayaan masyarakat; menyangkut pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
- b) Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dalam menjamin keamanan dan ketertiban wilayah
- c) Memfasilitasi desa dalam peningkatan dan pemberdayaan aparatur dan lembaga-lembaga desa, PKK, BPD, LKMD
- d) Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap pemerintahan dan perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa dengan ADD dan Dana Desa
- e) Melaksanakan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan desa
- f) Memfasilitasi lembaga dan panitia dalam penyaluran hak-hak politik rakyat
- g) Memfasilitasi desa dalam menyelesaikan sengketa desa
- h) Melaksanakan pemberian informasi
- i) Melaksanakan verifikasi dan melakukan rekomendasi untuk pemberian izin-izin
- j) Membuat dan memelihara Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- k) Memelihara bahu jalan
- l) Pemeliharaan desa binaan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Balige dalam Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun Terakhir

No.	Indikator	Target (%)					Realisasi(%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	(Tujuan) Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan kecamatan		100	100	100	100		97.65	98.35	80.37	100.00
1.1	(Sasaran I) Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik		100	100	100	100		100	91.9	50	100
1.1.1	(Program) Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan		100	100	100	100		100	91.9	50	100
1.2	(Sasaran II) Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan		100	100	100	100		88.25	99.83	85.71	100
1.2.1	Program) Cakupan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100	100	100	100		99.83	85.71	100	99.83
1.3	(Sasaran III) Persentase layanan administrasi pemerintahan umum		100	100	100	100		100	100	100	100
1.3.1	(Program) Persentase desa/kelurahan tertib administrasi pemerintahan umum		100	100	100	100		100	100	100	100
1.4	(Sasaran IV) Persentase desa dan kelurahan yang melaksanakan tertib Administrasi		100	100	100	100		100	100	100	100
1.4.1	(Program) Persentase desa/kelurahan tertib administrasi umum pemerintahan desa		100	100	100	100		100	100	100	100
1.5	(Sasaran V) Persentase layanan administrasi yang tertangani								100	66.16	100
			100	100	100	100			100		
1.5.1	(Program) Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah		100	100	100	100		100	100	66.16	100

Berdasarkan analisis dari tabel diatas, target pada Tujuan, Sasaran dan Program yang telah ditetapkan namun Realisasi capaian target tersebut tidak tercapai dikarenakan keterbatasan Pagu Anggaran yang disediakan dan adanya beberapa kegiatan yang dilimpahkan ke OPD terkait sehingga target pada kegiatan maupun subkegiatan dari beberapa program tidak dapat dilaksanakan. Berikut di bawah ini Tabel terkait Target dan Realisasi Pendanaan Program dari Tahun 2020-2024 :

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Pendanaan Program Kecamatan Balige Tahun 2020-2024

No	Program	Target (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			250,000,000	262,000,000	274,000,000			145,860,000	149,949,536	172,367,200			58.34%	57.23%	62.91%
2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			915,000,000	920,000,000	930,500,000		-	431,850,000	300,416,933	414,790,820			47.20%	32.65%	44.58%
3	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			20,000,000	20,000,000	25,000,000			19,200,000	19,200,000	19,200,000			96.00%	96.00%	76.80%
4	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,000,000	11,500,000	12,000,000			8,800,000	10,800,000	7,800,000			80.00%	93.91%	65.00%
5	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,311,068,229	3,315,317,091	3,367,272,450			2,540,500,311	2,730,300,296	2,977,116,856			76.73%	82.35%	88.41%
	Jumlah			4,507,068,229	4,528,817,091	4,608,772,450		-	3,146,210,311	3,210,666,765	3,591,274,876			69.81%	70.89%	77.92%

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah Kecamatan Laguboti adalah masyarakat Kecamatan Balige sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Toba maupun peraturan yang lebih tinggi. Jumlah warga masyarakat Kecamatan Balige pada Tahun 2025 berdasarkan Data Rekapitulasi Kecamatan Balige adalah 252.156 jiwa, yang mayoritas penduduknya adalah sebagai petani yang tersebar di 35 Desa/Kelurahan. Kepadatan penduduk di kecamatan Balige adalah 315,92 jiwa/km².

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BALIGE

Dalam proses pencapaian tujuan, analisis potensi tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Balige dalam 5 (lima) tahun ke depan sangat perlu dilakukan. Berikut ini diuraikan beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi, yaitu:

A. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugasnya, beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Balige antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan dan seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Kemajuan teknologi terutama Teknologi Informasi memaksa birokrasi untuk menyediakan layanan yang murah, mudah, cepat, akurat kepada masyarakat;
3. Era keterbukaan informasi publik menuntut informasi layanan masyarakat dilakukan secara transparan dan menyeluruh;

4. Makin besarnya tantangan terkait semakin tingginya dan semakin beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindaklanjuti;
5. Adanya dana pembangunan dan pemberdayaan di desa dari Pemerintah Pusat menuntut Kecamatan untuk semakin bijak melakukan koordinasi dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kecamatan;
6. Penggunaan Teknologi Informasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaporan pelaksanaan kegiatan menuntut peningkatan kapasitas aparatur dan sarana prasarana mulai dari pemerintahan Kecamatan sampai ke pemerintahan desa dan kelurahan yang sampai saat ini masih rendah;
7. Latar belakang pendidikan PNS di Lingkungan Desa masih belum memadai dan perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM Desa dan Kecamatan;

B. Isu Strategis

Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Balige dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan Teknologi Informasi (e government) sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga pemerintahan Kecamatan memiliki gambaran tentang penerapan Teknologi Informasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat;
2. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, proses penerimaan ASN yang dilakukan secara transparan mendukung ketersediaan Sumber Daya aparatur yang muda, berpikir maju, dan inovatif sehingga diharapkan dapat menyumbangkan energi positif dalam perubahan ke arah yang lebih baik;

3. Adanya dana khusus dari Pemerintah Pusat yang menjadi sumber pembiayaan utama di desa dan kelurahan sangat mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat sampai ke pelosok desa;
4. Ketersediaan layanan Internet sampai ke pelosok desa mendukung luasnya informasi yang dapat diakses masyarakat sampai ke pelosok desa;
5. Tatahan kehidupan masyarakat yang memiliki filosofi Dalihan Natolu yang menyelesaikan setiap permasalahan dengan kekeluargaan;
6. Letak Kecamatan Balige yang merupakan berdekatan dengan industry, dapat diakses ke berbagai arah;
7. Hubungan yang harmonis antara instansi terkait dan para pemangku kepentingan (Stake Holders);
8. Terlaksananya koordinasi yang optimal dari berbagai seksi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
9. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kecamatan, desa sehingga mendorong masyarakat partisipasi dalam program dan kegiatan pembangunan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN BALIGE

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkrit dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra Strategis) adalah hal sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing -masing perangkat daerah secara mikro. Maka dalam perumusan Tujuan Renstra Kecamatan akan diselaraskan dengan misi, tujuan/saran daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Pada tabel 3.1 dapat dilihat Misi,tujuan/sasaran daerah dalam RPJMD Kabupaten 2025-2029 relevan dalam perumusan Tujuan Sasaran Renstra Kecamatan.

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih sebagai Pelayanan (Parhobas) Rakyat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas untuk mendukung Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatkannya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

3.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN BALIGE

Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Balige Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah :” Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”. Dan yang menjadi indikator tujuan Renstra Kecamatan Balige adalah “ Indeks Kepuasan Masyarakat “ dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Toba .

Untuk Mengoptimalkan pencapaian dan tujuan sebagai dimaksud diatas maka sasaran yang harus dicapai dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH.

2. Meningkatnya Pembinaan Pemerintah Desa.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.
4. Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

TABEL 3.2 TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA KECAMATAN BALIGE 2025-2029
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	-12
7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Balige											
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	-	-	76,60	78,84	81,13	83,49	88,40	
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya pembinaan pemerintah desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	0	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	65,50	74,75	76,80	78,80	80,80	82,80	84,80	

3.3 STRATEGI RENSTRA KECAMATAN BALIGE

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari

waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah- langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah.

Pencapaian tujuan dan sasaran renstra membutuhkan adanya strategi yang akan mengarahkan terlaksananya tujuan dan sasaran dimaksud. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran renstra merupakan upaya-upaya yang menjadi arahan utama pelaksanaan program, yaitu:

1. Penentuan tahapan pelaksanaan renstra untuk mewujudkan capaian tujuan;
2. Penentuan program prioritas untuk mewujudkan optimalisasi anggaran dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran;

1.1 Penahapan Renstra Kecamatan Balige
Dapat disajikan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

TABEL 3.3 PENAHAPAN RENSTRA KECAMATAN BALIGE

	TAHAP I 2026	TAHAP I 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
RPJMD	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik;	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan publik;	Pemantapan kualitas pelayanan publik;	Perwujudan Toba Mantap sebagai landasan menuju Toba Unggul, Maju dan Berkelanjutan
Renstra Kecamatan	Penyiapan landasan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas untuk mendukung Toba Mantap	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung Toba Mantap

3.4 **ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN BALIGE**

Pencapaian tujuan renstra kecamatan dilaksanakan melalui 4 sasaran yang diwujudkan dalam program prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai target sasaran renstra.

Program prioritas dimaksud dalam pencapaian target tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan outcome meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan outcome meningkatnya pemberdayaan masyarakat.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan outcome meningkatnya pembinaan pemerintah desa.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan outcome meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.

TABEL 3.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN BALIGE 2025-2029

VISI : “TOBA MANTAP 2029 : Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya.”				
MISI NO 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat.				
NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kewenangan yang Dilimpahkan KDH	Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan	1. Penyediaan SOP pelaksanaan kewenangan
		Meningkatnya pembinaan pemerintah desa	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan desa/kelurahan
				2. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
				3. Meningkatkan pengawasan kegiatan yang dilakukan desa
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan umum	1. Melibatkan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum
				2. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana umum dengan melibatkan masyarakat
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Peningkatan kinerja dengan beorientasi pada pelayanan	1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
				2. Penyusunan SOP sebagai standar pelayanan
				3. Meyediakan saluran pengaduan masyarakat

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Daftar Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam mencapai kinerja Kecamatan Ajibata dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Perumusan Program, Kegiatan, Sub kegiatan Kecamatan BALIGE ditampilkan dalam tabel berikut :

4.2 Daftar Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, Kecamatan Balige menyusun program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan pohon kinerja kecamatan yang ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut :

TABEL 4.1 PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA KECAMATAN BALIGE 2025-2029
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Balige							
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH			Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
					Kesesuaian layanan dengan SOP (%)		
			Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH		Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan		Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya pembinaan pemerintah desa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
					Tingkat Pembinaan Desa (%)		
					Tingkat Pembinaan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
					Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)		
					Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
					Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)		
					Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.01.0.00.0.00.01.0001 - Kelurahan Napitupulu							
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
					Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)		
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat				7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
7.01.0.00.0.00.01.0002 - Kelurahan Pardede Onan							
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
7.01.0.00.0.00.01.0003 - Kelurahan Sangkar Nihuta							
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
					Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)		
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
7.01.0.00.0.00.01.0004 - Kelurahan Balige III							
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
7.01.0.00.0.00.01.0005 - Kelurahan Balige I							
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
					Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
7.01.0.00.0.00.01.0006 - Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange							
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)		
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

- 4.3 Daftar Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, Kecamatan Balige menyusun program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan pohon kinerja kecamatan yang ditampilkan dalam Tabel sebagai berikut :

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KETER ANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				8.670.436.000,00		9.024.342.000,00		9.058.754.000,00		9.200.702.000,00		9.381.216.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.172.436.000,00		6.506.342.000,00		6.540.754.000,00		6.682.702.000,00		6.783.216.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	65,5	76,80	6.172.436.000,00	78,80	6.506.342.000,00	80,80	6.540.754.000,00	82,80	6.682.702.000,00	84,80	6.783.216.000,00	7.01.0.00 .0.00.01. 0000 - Kecamat an Balige	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	4	20.000.000,00	4	40.000.000,00	4	60.000.000,00	4	80.000.000,00	5	80.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	22		22		23		22		22			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	4	5.000.000,00	4	15.000.000,00	4	25.000.000,00	4	35.000.000,00	5	35.000.000,00		

7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	22	15.000.000,00	22	25.000.000,00	23	35.000.000,00	22	45.000.000,00	22	45.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.712.824.000,00		5.712.824.000,00		5.712.824.000,00		5.712.824.000,00		5.712.824.000,00		
Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	70	5.712.824.000,00	70	5.712.824.000,00	70	5.712.824.000,00	70	5.712.824.000,00	70	5.712.824.000,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.712.824.000,00		5.712.824.000,00		5.712.824.000,00		5.712.824.000,00		5.712.824.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	70	5.712.824.000,00	70	5.712.824.000,00	70	5.712.824.000,00	70	5.712.824.000,00	70	5.712.824.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				128.000.000,00		330.000.000,00		386.318.000,00		410.000.000,00		480.000.000,00		
Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	128.000.000,00	12	330.000.000,00	12	386.318.000,00	12	410.000.000,00	12	480.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT	KETERANGA

/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		2024	2026		2027		2028		2029		2030		DAERA H	N
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	38.000.000,00	12	50.000.000,00	12	80.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000,00		50.000.000,00		51.734.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	10.000.000,00	12	50.000.000,00	12	51.734.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	20.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	30.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	80.000.000,00	12	100.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000,00		130.000.000,00		154.584.000,00		130.000.000,00		180.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	30.000.000,00	12	130.000.000,00	12	154.584.000,00	12	130.000.000,00	12	180.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		97.906.000,00		50.000.000,00		148.266.000,00		50.000.000,00		

Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	1	97.906.000,00	1	50.000.000,00	1	148.266.000,00	1	50.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		47.906.000,00		0,00		100.000.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	1	47.906.000,00	1	0,00	1	100.000.000,00	1	0,00		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		48.266.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	48.266.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				149.622.000,00		149.622.000,00		149.622.000,00		149.622.000,00		149.622.000,00		
Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	149.622.000,00	12	149.622.000,00	12	149.622.000,00	12	149.622.000,00	12	149.622.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				44.622.000,00		44.622.000,00		44.622.000,00		44.622.000,00		44.622.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	44.622.000,00	12	44.622.000,00	12	44.622.000,00	12	44.622.000,00	12	44.622.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				161.990.000,00		175.990.000,00		181.990.000,00		181.990.000,00		310.770.000,00		
Terpeliharanya BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	161.990.000,00	30	175.990.000,00	30	181.990.000,00	30	181.990.000,00	30	310.770.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8		8		8		8		50.000.000			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	18		18		18		18		18			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				110.990.000,00		110.990.000,00		110.990.000,00		110.990.000,00		110.990.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	18	110.990.000,00	18	110.990.000,00	18	110.990.000,00	18	110.990.000,00	18	110.990.000,00		

7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		21.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	21.000.000,00	30	21.000.000,00	30	21.000.000,00	30	21.000.000,00	30	21.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000,00		44.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		178.780.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	8	30.000.000,00	8	44.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	50.000.000	178.780.000,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		80.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	100	20.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	80.000.000,00	7.01.0.00.0000 - Kecamatan Balige	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				10.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		70.000.000,00		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	70.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya ketersediaan SOP pelayanan publik	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		4		4		4		4		4			
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)		4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		

Pelayanan Perizinan Non Usaha														
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.460.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	2.420.000.000,00	100	2.420.000.000,00	100	2.420.000.000,00	100	2.420.000.000,00	100	2.460.000.000,00	7.01.0.00 .0.00.01. 0000 - Kecamatan Balige	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)		3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		50.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT	KETERANGA

/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		2024	2026		2027		2028		2029		2030		DAERA H	N
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)		36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	50.000.000,00		
7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)		36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	10.000.000,00	36	50.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat				2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.460.000.000,00	7.01.0.00 .0.00.01. 0001 - Keluraha n Napitupulu	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		2		2		2		2		2			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		

7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat				2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.460.000.000,00	7.01.0.00 .0.00.01. 0002 - Kelurahan Pardede Onan	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGA

/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		2024	2026		2027		2028		2029		2030			N
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat				2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.460.000.000,00	7.01.0.00 .0.00.01. 0003 - Keluraha n Sangkar Nihuta	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		4		2		2		2		2			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		4	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat				2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.460.000.000,00	7.01.0.00 .0.00.01. 0004 - Keluraha n Balige III	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		

Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat				2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.460.000.000,00	7.01.0.00 .0.00.01. 0005 - Kelurahan Balige I	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		4		4		4		4		4			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT	KETERANGA

/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		2024	2026		2027		2028		2029		2030		DAERA H	N
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat				2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.420.000.000,00		2.460.000.000,00	7.01.0.00 .0.00.01. 0006 - Keluraha n Lumban Dolok Hauma Bange	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya pemberdayaan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		4		4		2		2		2			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)		2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)		4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		

Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	7.01.0.00 .0.00.01. 0000 - Kecamat an Balige	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		
Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	13.000.000,00	12	13.000.000,00	12	13.000.000,00	12	13.000.000,00	12	13.000.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	13.000.000,00	12	13.000.000,00	12	13.000.000,00	12	13.000.000,00	12	13.000.000,00		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	7.01.0.00 .0.00.01. 0000 - Kecamat an Balige	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KETER ANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			

OUTPUT			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100	100		100		100		100		100			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00 .0.00.01. 0000 - Kecamatan Balige	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	29	29	10.000.000,00	29	10.000.000,00	29	10.000.000,00	29	10.000.000,00	29	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERA H	KETER ANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	29	29	10.000.000,00	29	10.000.000,00	29	10.000.000,00	29	10.000.000,00	29	10.000.000,00		

4.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balige sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Balige sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategi ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Toba Tahun 2025- 2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Balige.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Ajibata. Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya

harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.

Harapan kami Renstra Kecamatan Balige ini bermanfaat bagi Pemerintah Kecamatan Balige khususnya dalam upaya pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada upaya-upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Toba. sesuai dengan Visi Kabupaten Toba **“Toba Mantap 2029”: Maju Daerahnya Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya.**

Balige , Juni 2025

CAMAT BALIGE



PARTOGI IHUTAN TAMBUNAN, SSTP, M.A

NIP. 198709112006021003